

BAB I

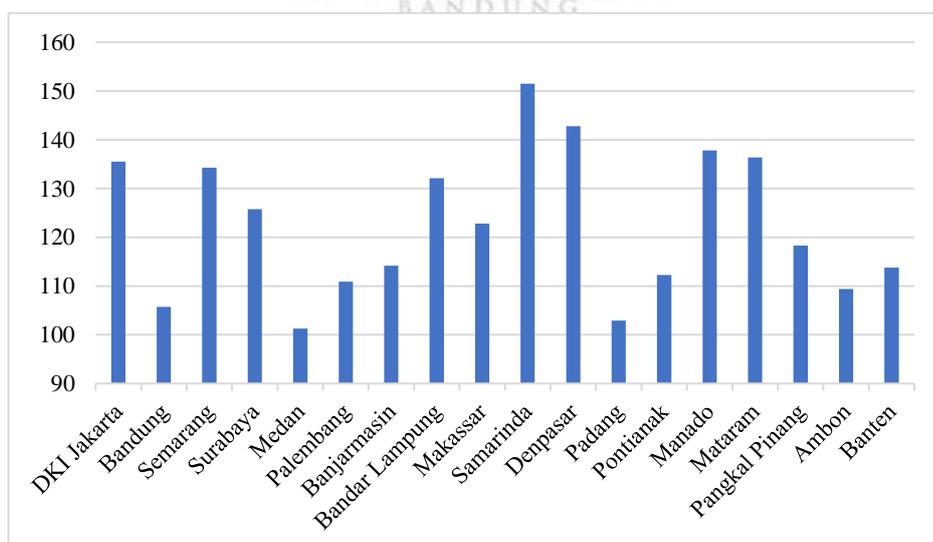
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, memiliki dinamika konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Aktivitas perdagangan yang berkembang pesat, baik dari sektor formal maupun informal, menjadikan tingkat konsumsi masyarakat sebagai indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi daerah. Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran atas menurunnya kepercayaan konsumen di Kota Bandung, yang tercermin dari perubahan perilaku belanja, preferensi terhadap produk, dan kecenderungan untuk menahan konsumsi.

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu indikator penting dalam meninjau sejauh mana kebijakan ekonomi terlaksana dengan baik. Di banyak negara termasuk Indonesia, daya beli masyarakat dapat diukur dengan nilai Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) (OCBC, 2023). Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai IKK Indonesia pada Oktober 2024 berada pada level optimis dengan nilai sebesar 121,1. Namun, jika melihat beberapa daerah di Indonesia, nilai IKK yang ada cenderung beragam dan fluktuatif. Seperti halnya data IKK per-daerah pada grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1. 1 Indeks Kepercayaan Konsumen berdasarkan daerah (2024)



Sumber: (Bank Indonesia, 2024b)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen di 18 daerah di Indonesia rata-rata berada pada level optimis atau di atas angka 100. Kota Medan, Padang, dan Bandung memiliki nilai IKK terkecil dan memiliki selisih yang tipis dengan ambang batas penentuan IKK yakni sebesar 100. Bahkan, Kota Bandung sendiri mengalami penurunan nilai IKK yang cukup signifikan dalam 3 bulan berturut-turut, yakni nilai IKK pada bulan Agustus 2024 sebesar 113,9, bulan September 2024 sebesar 108,4, dan pada bulan Oktober 2024 sebesar 105,7.

Selama ini, kepercayaan konsumen di Indonesia didukung dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan baik pada bidang moneter, fiskal, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Contohnya seperti kebijakan penentuan suku bunga acuan (BI Rate) yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dijalankan, kenyataannya indeks kepercayaan konsumen di beberapa kota di Indonesia masih rendah.

Menurut John Maynard Keynes dalam teorinya yakni teori Kebijakan Ekonomi Keynesian, ketika negara ingin mengeluarkan situasi dari pasca adanya *The Great Depression*, pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang akan meningkatkan kondisi ekonomi melalui permintaan. Pada fenomena penelitian ini, kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya, belum mampu untuk meningkatkan Indeks Kepercayaan Konsumen di beberapa kota di Indonesia. Oleh karena itu, alih-alih mengganti semua kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan untuk membantu peningkatan kepercayaan konsumen.

Pemerintah Indonesia ternyata sudah melakukan intervensi kebijakan berupa merubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian dari strategi fiskal nasional. Tentunya, kebijakan ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan angka kepercayaan konsumen melalui permintaan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan intervensi melalui revisi kebijakan terkait perpajakan. Baru-baru ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Kebijakan perpajakan terbaru ini mengatur berbagai hal termasuk adanya perubahan tarif pada tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 1. 1 Perubahan kebijakan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Sebelum adanya perubahan	: UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Tarif umum 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
Sesudah adanya perubahan	: UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 1. Tarif PPN normal sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak 2. Terdapat tarif PPN final sebesar 1%-3% bagi barang/jasa kena pajak tertentu
Tanggal pemberlakuan kebijakan baru	: Dimulai pada masa pajak April tahun 2022

Sumber: (BPK RI, 2025)

Sebelum April 2022, besaran tarif PPN yang berlaku yaitu sebesar 10% dan meningkat menjadi 11% sesudah adanya intervensi perubahan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam peraturan tersebut, juga termuat adanya penerapan kebijakan baru yakni PPN final untuk UMKM yang dikenakan sebesar 1%-3% dari omzet untuk barang/jasa tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengintervensi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hingga untuk mengoptimalkan daya beli masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

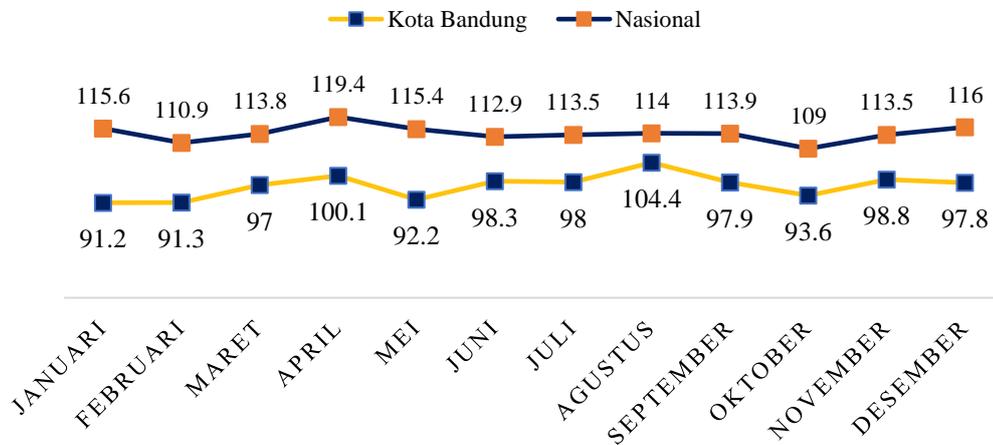
Intervensi kebijakan yang terjadi pada pemberlakuan PPN bukan tanpa alasan. Dilansir dari laman Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan RI, saat itu, kontribusi penerimaan pajak di tahun 2021 didominasi oleh sektor PPh dan PPN. Terlebih lagi, realisasi penerimaan neto pada tahun 2021 berasal juga dari penerimaan PPh dan PPN, yang masing-masing berkontribusi sebanyak 55,48% dan 41,91% terhadap penerimaan pajak secara total. Jika ditinjau lebih jauh lagi, penerimaan PPN secara kinerja kumulatif mengalami pertumbuhan positif dan signifikan sebesar 19,78%. Realisasi penerimaan PPN sebesar 97,57% dari total penerimaan PPN, ditopang oleh sub-komponen PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. PPN DN meningkat secara positif sebanyak 11,64% dan PPN Impor juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,59% (Setyawan, 2021).

Di sisi lain, dalam Laporan Belanja Perpajakan tahun 2021, Kementerian Keuangan RI telah melakukan pendataan terhadap beberapa insentif perpajakan dalam rangka pemulihan dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dari data yang ada, Pemerintah Indonesia melakukan belanja pajak sebesar Rp175 triliun pada komponen PPN dan PPnBM. Nominal tersebut merupakan besaran nominal paling besar dari total belanja perpajakan pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 58,5% (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Seluruh pencapaian tersebut tidak lepas dari kontribusi 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP di seluruh Indonesia.

Adanya intervensi pemerintah pada pemberlakuan PPN di masyarakat, akan memberikan dampak tersendiri pada jumlah penerimaan negara dan situasi perekonomian masyarakat. Tarif PPN yang mengalami kenaikan, memiliki potensi dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak. Namun di samping itu, intervensi perubahan kebijakan pada PPN dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan gejala perekonomian, bahkan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai konsumen (Chandra & Sandra, 2020; Cingl et al., 2023; Mansur et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menduga bahwa indeks kepercayaan konsumen di Kota Bandung yang turun signifikan dan berada di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh adanya salah satu indeks pembangun kepercayaan konsumen Kota Bandung yang bermasalah. Dalam mengukur Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), terdapat 2 (dua) indeks pembangun yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspetasi Konsumen (IEK). Peneliti menduga bahwa Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang terus menurun dan juga berada di bawah rata-rata nasional menjadi penyebab Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Kota Bandung rendah dan terus menurun.

Dugaan peneliti tersebut didasarkan atas penilaian Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa nilai IKE Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 4,6 pada bulan Oktober 2024. Selain itu, rata-rata nilai IKE Kota Bandung juga terlihat berada di bawah rata-rata nilai IKE nasional. Data tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini.

Grafik 1. 2 Nilai IKE Kota Bandung tahun 2024

Sumber: (Bank Indonesia, 2024a)

Dari grafik 1.2, dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2024, nilai IKE Kota Bandung berada di bawah rata-rata nilai IKE nasional. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penyebab nilai Indeks Kepercayaan Konsumen Kota Bandung pada tahun 2024 juga rendah dan berada di bawah rata-rata nasional. Ini berarti, perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap indeks-indeks pembangun nilai IKK yaitu IKE dan IEK agar nilai indeks kepercayaan konsumen di Kota Bandung dapat terus meningkat dan berada di atas rata-rata nilai IKK nasional. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan yaitu dengan turut melakukan intervensi kebijakan berupa merubah beberapa skema kebijakan yang dapat meningkatkan indeks-indeks pembangun kepercayaan konsumen, khususnya pada bidang kebijakan fiskal.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih dalam lagi terhadap adanya intervensi perubahan kebijakan pada komponen PPN. Maka, penelitian ini dilakukan dengan urgensi bahwa kebijakan tarif PPN yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (3) UU HPP disebutkan dapat terus meningkat hingga 15%, sehingga seluruh peraturan dan kebijakan yang berkaitan perlu dilakukan pengkajian agar kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat selaku konsumen. Adapun judul penelitian yang diangkat berdasarkan latar belakang yaitu **“Pengaruh Intervensi Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepercayaan Konsumen di Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang akan diangkat berdasarkan identifikasi masalah di atas terdiri dari:

1. Apakah terdapat pengaruh antara variabel intervensi kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh variabel intervensi kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung?
3. Seberapa besar sumbangan efektif dimensi *agent*, *target*, *time and place*, dan *mechanism* pada variabel intervensi kebijakan PPN dalam mempengaruhi variabel kepercayaan konsumen di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi adanya pengaruh antara intervensi kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung
2. Mengidentifikasi besaran pengaruh intervensi kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi sumbangan efektif dimensi *agent*, *target*, *time and place*, dan *mechanism* pada variabel intervensi kebijakan PPN dalam mempengaruhi variabel kepercayaan konsumen di Kota Bandung?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis atau dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis atau dari segi pengaplikasian pada kehidupan. Berikut merupakan penjabaran manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Selain bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan kajian keilmuan bagi khalayak pembaca. Wawasan terkait pengaruh dari pemberlakuan kebijakan baru akan menjadi terobosan yang membantu para pemangku kepentingan publik dalam mengambil keputusan.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khazanah sosial untuk masyarakat sekitar karena objek dan lokus penelitian berada di lingkungan peneliti.
- b. Bagi universitas, dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Administrasi Publik, dan menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas yang dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lainnya.
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memahami perpajakan sekaligus memberikan tuntunan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan.
- d. Bagi Pemerintah Indonesia dapat memberikan gambaran terkait pengaruh dan signifikansi kebijakan PPN terhadap kepercayaan konsumen. Hal tersebut kemudian dapat menjadi landasan dalam penentuan sasaran program berikutnya.

E. Kerangka Berpikir

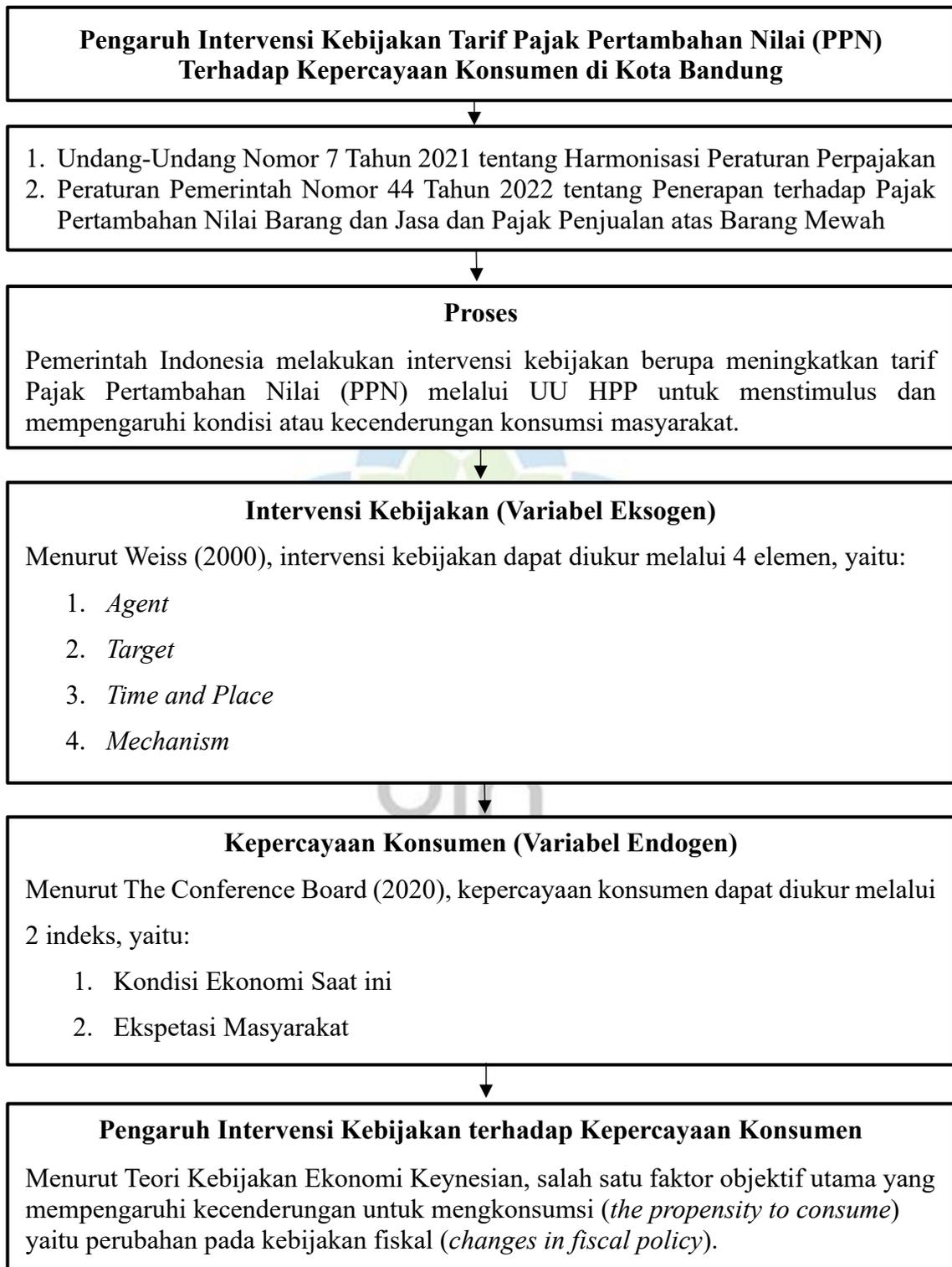
Kerangka pemikiran ditinjau sebagai rangkaian alur berpikir dalam menjelaskan hubungan antar konsep berdasarkan tinjauan pustaka yang ada. Konsep pemikiran pada penelitian ini tidak akan lepas dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Intervensi Kebijakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Kepercayaan Konsumen di Kota Bandung”.

Intervensi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang terkait untuk mempengaruhi sekaligus merubah arah dan hasil kebijakan yang ada (Weiss, 200). Menurutnya, kebijakan publik yang berhasil bergantung pada pemahaman tentang masalah yang sedang ditangani, tujuan kebijakan yang jelas, dan evaluasi yang tidak bias terhadap efektivitas kebijakan. Intervensi kebijakan harus didasarkan pada data empiris dan evaluasi yang ketat. Weiss (2000) menjelaskan bahwa dalam melakukan intervensi kebijakan harus melibatkan elemen-elemen dalam teori intervensi itu sendiri, yaitu *agent*, *target*, *time and place*, dan *mechanism* (Weiss, 2000).

Kepercayaan konsumen merupakan ukuran tingkat optimisme konsumen terhadap keadaan ekonomi saat ini dan masa depan serta situasi keuangan pribadi mereka. Kepercayaan konsumen menjadi indikator ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan bisnis untuk menilai perspektif konsumen dan memprediksi tren pengeluaran di masa mendatang. Karena merupakan indikator ekonomi yang paling erat kaitannya dengan perilaku konsumen, maka kepercayaan konsumen merupakan tolok ukur yang berguna untuk mengetahui mengapa konsumen lebih terpengaruh oleh beberapa kebijakan fiskal daripada yang lain (Omohundro, 2016). Dalam mengukur keberdayaan masyarakat sebagai konsumen, negara-negara di dunia menggunakan indikator dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) atau *Consumer Confidence Index (CCI)* yang dikeluarkan oleh The Conference Board. Untuk mengukur Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), Bank Indonesia dan The Conference Board menggunakan 2 (dua) indeks pembangun yakni Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) (Bank Indonesia, 2024a).

Menurut John M. Keynes, terdapat hubungan kausal antara intervensi kebijakan dengan kepercayaan konsumen yang dijelaskan dalam teori Kebijakan Ekonomi Keynesian. Keynes menyebutkan bahwa kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan untuk mengeluarkan negara dari pasca *The Great Depression*. Keynes menjelaskan bahwa kecenderungan untuk mengkonsumsi (*the propensity to consume*) merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas siklus ekonomi di negaranya. Keynes menjelaskan bahwa salah satu faktor objektif utama yang mempengaruhi kecenderungan untuk mengkonsumsi (*the propensity to consume*) yaitu perubahan pada kebijakan fiskal (*changes in fiscal policy*) (Keynes, 2018).

Gambar 1. 1 Bagan kerangka pemikiran



Sumber: (Bank Indonesia, 2024a; BPK RI, 2025; Keynes, 2018; Weiss, 2000)

F. Hipotesis

Penetapan hipotesis penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan asumsi sementara terkait sebuah masalah yang akan diteliti dan perlu melakukan pembuktian. Nantinya, kebenaran dari asumsi yang telah ditetapkan akan teridentifikasi setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Adapun hipotesis yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini yakni:

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara intervensi kebijakan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung.

H₁: Terdapat pengaruh antara intervensi kebijakan tarif PPN terhadap kepercayaan konsumen di Kota Bandung.

